

BAB II GAMBARAN UMUM

1.1. Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km. Kondisi geografis kota Semarang dapat dilihat

pada gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2. 1. Peta Wilayah Kota Semarang
Sumber: Bappeda Kota Semarang

Kota Semarang memiliki Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, yaitu dengan Visi “Semarang Kota

Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya”. Adapun Misi Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal.

1.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi di pulau Jawa, di atas permukaan laut dan dikenal dengan sebutan Semarang bawah. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1.
Letak Geografis Kota Semarang

Uraian	Letak bujur –lintang	Batas Wilayah
Sebelah utara	6 0 50 ‘ LS	Laut Jawa
Sebelah Selatan	7 0 10 ‘ LS	Kab. Semarang
Sebelah Barat	109 0 50 ‘ BT	Kab. Kendu
Sebelah Timur	110 0 35 ‘ BT	Kab. Demak

Sumber : *semarangkota.bps.go.id*

Kota Semarang yaitu memiliki letak geografis strategis merupakan sebuah lokasi pembangunan di Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat Semarang sangat berperan penting dalam perkembangan dan suatu pertumbuhan

di Jawa Tengah , terutama dengan adanya pelabuhan untuk jaringan jalur transportasi laut dan jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan raya) serta jaringan transportasi udara, yaitu bandara udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Jawa Tengah.

1.1.2. Visi dan Misi

a. Visi

“ Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

b. Misi

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

1.2. Gambaran Umum DPMPTSP

1.2.1. Sejarah Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Gambaran umum tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah yang mencakup sejarah, visi dan misi, penghargaan, pelayanan, rencana umum penanaman modal, dan struktur organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah diperoleh dari website resmi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, yaitu: <http://dpmpmsp.jatengprov.go.id>. Kegiatan investasi merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan yang strategis namun krusial. Strategis, karena harus mengelola sumberdaya pembangunan untuk membangun aset-aset produksi agar menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan domestik maupun ekspor. Krusial, karena memerlukan daya visioner yang jauh ke depan untuk memprediksi permintaan pasar, sehingga apabila tidak tepat sasaran akan terjadi pemborosan sumberdaya nasional. Sehubungan dengan itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas peran dan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat lainnya dalam mengelola kegiatan investasi untuk membangun Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai dasar pengaturan investasi maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Setahun kemudian para investor dalam negeri terpanggil untuk ikut berkiprah, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Tahun 1970, kedua undang-undang tersebut

direvisi lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang PMA dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1979 tentang PMDN. Guna melaksanakan kedua Undang-undang tersebut dibentuklah lembaga yang menangani masalah penanaman modal di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di pemerintah pusat dibentuk suatu lembaga yang dinamakan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1977 Juncto Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1981 tentang BKPM. Surat izin PMA diberikan oleh Presiden, sedangkan untuk PMDN izinnya dikeluarkan oleh BKPM atas nama Presiden. Untuk daerah dibentuk lembaga yang menangani penanaman modal yaitu Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM-D) yang tugasnya membantu Gubernur dalam bidang penanaman modal dan lembaga ini hanya berada di tingkat Provinsi.

Namun pada masa kepresidenan Prof. Dr. BJ. Habibie ada perubahan mengenai tugas dan fungsi BKPM-D yang diatur dengan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1980 diperbarui dengan Keputusan Presiden RI Nomor 116 Tahun 1998. Setahun kemudian, Keputusan Presiden RI tersebut dirubah lagi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 122 tahun 1999 yang memberikan Kewenangan BKPM-D untuk menerbitkan izin PMA/PMDN. Untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 122 Tahun 1999 di Provinsi Jawa Tengah diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 1999. Pada tahun 2000, pemerintah merevisi kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 yang menjelaskan tentang diperbolehkannya perbedaan nama, sepanjang tugas dan urusannya sama.

Di Provinsi Jawa Tengah, institusi yang membidangi penanaman modal telah mengalami beberapa kali perubahan. Kali pertama, dibentuk BKPM-D melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/260/1989 tanggal 28 September 1989 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja BKPM-D. Sejalan dengan dinamika perkembangan jaman, BKPM-D berubah menjadi Badan Penanaman Modal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001. Tujuh tahun kemudian, Badan Penanaman Modal berubah lagi menjadi Badan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008. Dan terakhir, berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016, nomenklatur Badan Penanaman Modal Daerah berubah lagi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kantor DPMPTSP terletak di Jl. Mgr Soegiyoptanoto No. 1 Semarang, Jawa Tengah. Namun, DPMPTSP yang dahulu bernama BPMD pernah menempati gedung yang beralamat di :

1. Jl. Gajah Mada No.55B Semarang (1 Oktober 1973-1974);
2. Jl. Pemuda No. 70 Lt.2 Semarang (Tahun 1974-1980);
3. Jl. Menteri Supeno No.14 Semarang (Tahun 1980-1983);
4. Jl. Mgr. Soegijopranoto No. 1 Semarang (Tahun 1983-sekarang).

2.2.1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

- Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera.
- (TETEP) Mboten Korupsi , Mboten ngapusi.

Misi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

- Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religus, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
- Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru.
- Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

Tugas Pokok dan Fungsi

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

1.2.2. Fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

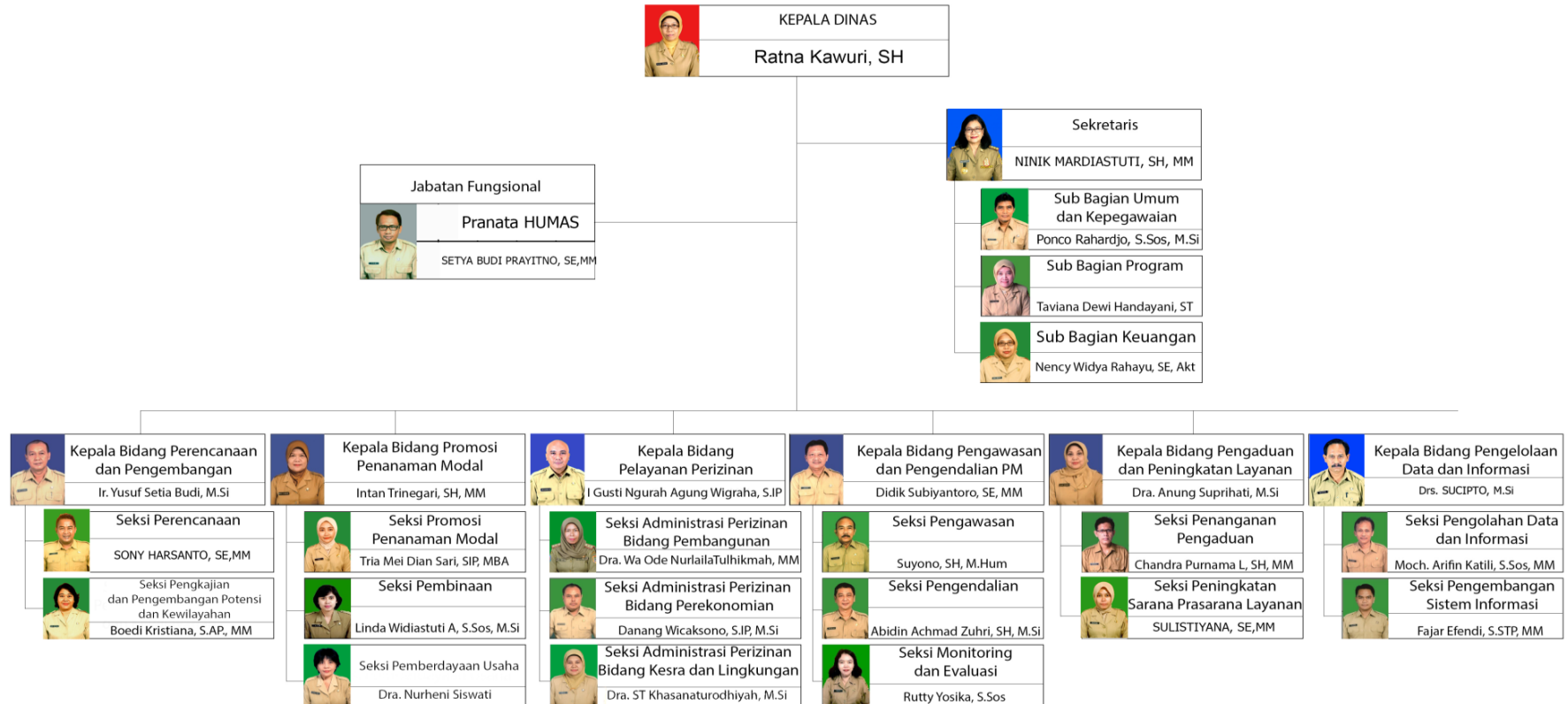
Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi; Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;

Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian

penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi; Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

1.2.3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH



1.3. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para karyawan di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah : Identifikasi responden meliputi : Usia , Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Lama Bekerja.

2.4.1 Distribusi Usia Responden

Usia merupakan tolak ukur menilai kedewasaan seseorang. Usia juga mempengaruhi kematangan berpikir seseorang dalam memilih atau menentukan suatu pilihan. Data usia responden dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2. 2.
Distribusi Usia Responden

No	Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 30	30	30
2.	30 - 40	14	14
3.	40 - 50	9	9
4.	50	10	10
Jumlah		63	63

Sumber : data primer yang diolah,2019

Berdasarkan data pada Tabel 2.2 diatas , diketahui bahwa usia responden dengan jumlah terbanyak 30 responden berada pada karyawan yang berusia < 30 tahun.

2.4.2 Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin responden dibedakan menjadi dua, yaitu laki – laki dan perempuan. Data dari jenis kelamin responden dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2. 3.
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase(%)
1.	Laki-laki	35	35
2.	Prempuan	29	29
Jumlah		63	63

Sumber data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel 2.3 diatas, dapat dilihat bahwa persentase responden karyawan berjenis kelamin laki-laki sebesar 35 responden. Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa kecenderungan responden berkelamin laki-laki.

2.4.3 Distribusi Pendidikan Terakhir Responden

Jenis dan tinggi rendahnya pendidikan akan mempengaruhi kecenderungan berpikir, gaya hidup dan jenjang status sosial. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka kemungkinan pendapatan semakin tinggi pula, hal tersebut akan berakhir pada meningkatnya gaya

hidup dan stastus sosial. Meningkatnya gaya hidup dan status seseorang. Akan berpengaruh pada potensi menurunnya intensi berkunjung pada obyek wisata yang dianggap murah.

Tabel 2. 4.
Pendidikan Terakhir Responden

No	Status pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SMA	9	9
2.	D3	6	6
3.	D4	1	1
3.	S1	41	41
4.	S2	5	5
Jumlah		63	63

Sumber : Data Primer yang diolah , 2019

Berdasarkan Tabel 3,4 , dapat dilihat bahwa sebagian responden latar belakang pendidikan terakhir ditingkat SMA yaitu 9 Responden diikuti lulusan Sarjana 41 responden cukup besar. Maka dapat disimpulkan dengan latar belakang pendidikan terakhir di tingkat SMA.